




Pemekaran RW Picu PPDB Error


Memang sengaja kami erorkan, karena ada perbaikan database. Database sudah kami lakukan sejak Februari, namun ternyata ada pemekaran RW. Ada sekitar 5 RW yang mengalami pemekaran.

Edy Heri Suasana
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Meski sempat diwarnai eror pada situs web atau *website* Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengaku sengaja tidak mengaktifkan *website*. Hal tersebut dilakukan karena adanya perbaikan basis data atau *database*.
"Memang sengaja kami errorkan, karena ada perbaikan *database*. *Database* sudah kami lakukan sejak Februari, namun ternyata ada pemekaran RW (Rukun Warga, **Red**). Ada sekitar 5 RW yang mengalami pemekaran," kata Edy Kamis (28/6).

Pemekaran RW Picu

• Sambungan Hal 13

"Dari pemekaran RW itu, akhirnya berpengaruh pada RW lain di sekitarnya. Misal RW 5 di Kadipaten, *lha* itu RW 6 dan 7 juga ikut terpengaruh. Setidaknya ada 17 RW yang mengalami perubahan. Makanya kami dorong untuk mengulang," sambungnya.

Ia mengungkapkan, meski sudah melakukan pendaftaran, namun orangtua harus melakukan verifikasi ke sekolah sesuai tanggal yang ditentukan. Melalui verifikasi tersebut, sistem akan membaca peserta didik berasal dari kota atau luar kota.

"Nanti semua akan ketahuan lewat verifikasi. Meskipun nanti daftarnya kota, tetapi KK-nya luar kota nanti tetap saja sama sistem langsung *cut off*. Harapannya ya masyarakat jujur saat mengisi. Pilih sekolah terdekat, biar anak nyaman dan tidak mikir jarak," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk membawa dokumen lengkap saat melakukan

verifikasi di sekolah, supaya tidak perlu bolak-balik. Dokumen yang perlu dibawa antara lain fotokopi Ijazah, SHUN asli dan fotokopi, KK, dan lain-lain.

Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Samiyo mengungkapkan ada tiga hal yang mendasari PPDB ini, yaitu kebijakan pemerintah, sistem aplikasi dan *database*.

"Kebijakan pemerintah tentu jadi penentu dari aplikasi dan mekanisme pengelolaan PPDB ini. Menurut Perwal No 24 KK orangtua yang digunakan, sehingga meskipun NIK sudah kota, tetapi KK luar kota tetap dianggap luar kota," ungkap Samiyo.

Ia melanjutkan, meski sempat ada perbaikan, namun saat ini situs sudah bisa diakses kembali. Menurutnya saat ini aplikasi sudah mapan, meski *database* perlu ada penyempurnaan.

Tanpa kecurangan

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Baskara Aji mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk

menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online secara bersih tanpa kecurangan.

Ombudsman RI DIY sebelumnya telah melakukan penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan PPDB Bersih dan Bebas Maladministrasi 2018, bersama Disdikpora DIY dan seluruh Dinas Pendidikan di DIY, dan Kanwil Kemenag DIY.

"Hasil penandatanganan komitmen tersebut saya tindak lanjuti dengan surat ke kepala dinas berupa pemberitahuan sekaligus diminta untuk mengimplemantasikan PPDB yang bersih transparan dan bebas maladministrasi," ungkapnya.

Ia lantas meminta setiap sekolah untuk menugaskan satu orang untuk menerima pengaduan. Pengaduan tersebut bila dapat diselesaikan di tingkat sekolah, maka hanya perlu dicatat untuk pendokumentasian.

Namun bila tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah dapat diarahkan ke Balai Pendidikan Menengah. Jika memang aduan tersebut tak dapat diselesaikan di Balai

Dikmen, maka akan diselesaikan di Disdikpora.

"Saya tegaskan pelaksanaan PPDB harus sesuai peraturan yang kita buat, dari Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Kepala Dinas. Terutama untuk sekolah negeri," katanya.

Sistem amburadul

Sementara Anggota Forpi Kota Yogyakarta Bidang Pemantauan dan Investigasi Baharuddin Kamba, menilai bahwa proses PPDB kali amburadul karena ada pengulangan pendaftaran karena materi yang harus diperbaiki. Menurutnya, kondisi ini rawan digugat bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pengulangan pendaftaran tersebut.

"Ini menunjukkan sistem yang belum siap, tapi dipaksakan ke masyarakat," ucapnya.

Sementara Taufik, Wakil Koordinator Forpi Kabupaten Sleman menyambut baik pembentukan Sekber Pos Pengaduan PPDB. Menurutnya, sekber ini akan lengkap bila ada keterlibatan media agar persoalan di dunia pendidikan cepat terpublikasi ke masyarakat. (cr2/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005